

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. LANDASAN KONSEPTUAL.....	12
2.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.2. Implementasi Kebijakan yang Berhasil.....	13
2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	15
2.2. Struktur Organisasi dan Kewenangan Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi	17
2.2.1. Struktur Organisasi.....	17
2.2.2. Kewenangan dalam Struktur Organisasi.....	18
2.2.3. Pengalihan Kewenangan.....	19
2.2.4. Pelimpahan Kewenangan.....	21

2.3. Pengelolaan Keuangan Negara.....	22
2.3.1. Hukum Keuangan Negara.....	22
2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	25
2.3.3. Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Keuangan Negara.....	27
2.3.3.1. Akuntabilitas Layanan Pengesahan DIPA.....	30
2.3.3.2. Transparansi Layanan Pengesahan DIPA.....	32
2.3.3.3. Responsivitas Layanan Pengesahan DIPA.....	33
2.4. Kajian Sebelumnya.....	35
2.5. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Desain Penelitian.....	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	41
3.4. Informan.....	42
3.5. Instrumen Penelitian.....	45
3.6. Teknik Analisis Data.....	46
3.7. Batasan Definisi Operasional.....	47
3.8. Ruang Lingkup Penelitian.....	51
BAB IV. DESKRIPSI KEBIJAKAN.....	52
4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	52
4.2. Ketentuan Pengesahan DIPA Pada Saat Kewenangan Pengesahan DIPA Masih Berada pada DJPB.....	53
4.3. Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.....	55
4.4. Ketentuan Pengesahan DIPA Pada Saat Kewenangan Pengesahan DIPA Telah Dialihkan Kepada DJA.....	58
4.5. Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengesahan DIPA dari DJA kepada Kanwil DJPB sebagai Strategi Implementasi Kebijakan.....	60

4.6. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I sebagai Pelaksana Kebijakan di Kanwil DJPB.....	61
BAB V. PROSES PENGESAHAN DIPA	63
5.1. Perbandingan Proses Pengesahan DIPA.....	63
5.1.1. Mekanisme Pengesahan DIPA pada Saat Kewenangan Pengesahan DIPA Masih Berada di DJPB.....	63
5.1.2. Mekanisme Pengesahan DIPA pada Saat Kewenangan Pengesahan DIPA telah dialihkan kepada DJA.....	68
5.1.3. Perubahan Mendasar dalam Mekanisme Pengesahan DIPA.....	79
5.1.4. Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Mekanisme.....	83
5.2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan.....	89
5.2.1. Kejelasan SOP.....	89
5.2.2. Konsistensi Kebijakan.....	97
5.2.3. Kesesuaian Kapasitas dan Fungsi.....	105
5.2.4. Kemudahan Koordinasi.....	108
BAB VI. HASIL KEBIJAKAN.....	118
6.1. Akuntabilitas.....	118
6.1.1. Ketepatan Penerimaan DIPA.....	118
6.1.2. Realisasi Pagu Minus.....	121
6.1.3. Kesamaan Data Hasil Revisi antara Satker dan KPPN.....	124
6.1.4. Realisasi APBN.....	126
6.1.5. Potensi Lahirnya Sikap Koruptif.....	136
6.2. Transparansi.....	142
6.2.1. Sosialisasi untuk Transparansi.....	142
6.2.2. Kemudahan Memperoleh Informasi.....	144
6.3. Responsivitas.....	146
6.3.1. Ketersediaan Sarana Komunikasi.....	146
6.3.2. Waktu Penyelesaian Permasalahan DIPA.....	147

BAB VII. PENUTUP.....	151
7.1. Kesimpulan.....	151
7.2. Rekomendasi.....	156

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Matriks Data dan Instrumen Penelitian.....	45
Tabel 5.1. Perubahan Setelah Implementasi Kebijakan.....	83
Tabel 5.2. Jumlah Revisi DIPA yang Diproses Setiap Bulan TA 2013 Dan 2014 Satker Lingkup Kanwil DJPB Prov. DIY.....	85
Tabel 5.3. Kategori dan Jenis Revisi.....	94
Tabel 5.4. Proses Pengelolaan Keuangan Negara, dipandang dari UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.....	98
Tabel 5.5. Perbedaan antara RKA K/L dan DIPA.....	100
Tabel 5.6. Jenis Dokumen Anggaran.....	103
Tabel 6.1. Daftar Realisasi Pagu Minus Satker Mitra KPPN Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.....	123
Tabel 6.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi DIPA Satker UNY, Kanwil Kemenag Prov.DIY dan Kantor Kemenag Kab. Sleman Tahun 2011-2014.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Realisasi Pagu APBN Lingkup Kanwil DJPB Prov.DIY tahun 2011-2014.....	7
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 5.1. Mekanisme Pengesahan DIPA Sebelum Implementasi Kebijakan (Kewenangan Pengesahan DIPA Berada Pada DJPB).....	67
Gambar 5.2. Mekanisme Pengesahan DIPA Setelah Implementasi Kebijakan (Kewenangan Pengesahan DIPA Beada Pada DJA).....	75
Gambar 5.3. Mekanisme Pengesahan atas Revisi DIPA Setelah Implementasi Kebijakan (Kewenangan Pengesahan Berada Pada DJA dan Kanwil DJPB	77
Gambar 5.4. (a) Tampilan Kategori Jenis Revisi dalam Aplikasi Revisi DIPA.....	93
Gambar 5.4. (b) Tampilan Kategori Jenis Revisi dalam Aplikasi Revisi DIPA.....	93
Gambar 6.1. Grafik Realisasi Pagu Anggaran Satker UNY Tahun Anggaran 2011-2014.....	130
Gambar 6.2. Grafik Realisasi Pagu Anggaran Satker Kanwil Kementerian Agama Prov.DIY Tahun Anggaran 2011- 2014.....	131
Gambar 6.3. Grafik Realisasi Pagu Anggaran Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011- 2014.....	132

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	Arsip Data Komputer
BLU	Badan Layanan Umum
BUN	Bendahara Umum Negara
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	Dewan Perwakilan Daerah
K/L	Kementerian Negara/Lembaga
Kanwil	Kantor Wilayah
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
Prov. DIY	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RKA K/L	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RUU	Rancangan Undang-undang
Satker	Satuan Kerja
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara
UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
UU	Undang-undang